

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pedagang kaki lima merupakan aktifitas ekonomi informal yang mempunyai posisi strategi pengembangan ekonomi daerah. Hal ini karena aktifitas ekonomi semacam ini menjadi tempat dimana masyarakat golongan ekonomi lemah menggantungkan kehidupannya. Sehubungan dengan itu, sektor ini perlu dikembangkan dan diberdayakan agar mampu menyediakan lapangan pekerjaan guna memberikan dorongan agar terpenuhinya hak masyarakat atas kehidupan yang layak. Dengan demikian, pedagang kaki lima harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik.

Untuk pasar tradisional mempunyai gagasan bagaimana kondisi pasar tradisional yang ada bisa lebih modern. Pasar boleh berstatus tradisional, tetapi suasana dan proses transaksi dipasar itu seperti pasar modern karena nyaman. "kita bukan mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern, tapi memodernisasi pasar tradisional kita". Tidak hanya proses transaksi nyaman, tetapi juga penataan pasar dan para pedagang tentunya diatur agar lebih rapi sehingga para pengunjung bisa berbelanja lebih nyaman. Namun faktanya, berbicara tentang pasar tradisional, tentu tidak bisa dilepas dari persoalan sampah, kedepannya agar pasar tradisional bebas, akan ada pola penanganan khusus.

Di Indonesia PKL adalah panggilan yang sangat terkenal dengan

sentimen untuk menjatuhkan individu-individu kelas. Keadaan darurat moneter dan menyempitnya lapangan kerja telah mendorong semakin banyaknya pedagang kaki lima di berbagai komunitas perkotaan di Indonesia. Penjual jalan raya muncul karena berbagai alasan. Salah satu alasan signifikan adalah kegagalan daerah kasual untuk mewajibkan angkatan kerja yang pada umumnya akan bertambah secara paksa yang tidak lengkap karena melimpahnya pekerjaan di daerah pertanian dan bertambahnya jumlah spesialis metropolitan yang memasuki dunia pasar kerja karena dari sekolah yang diperluas.

Selain itu, ada beberapa hal yang mendorong maraknya pedagang kaki lima: Tantangan keuangan, pembukaan usaha yang terbatas, urbanisasi. Perlu diingat bahwa dalam menjalankan PKL mereka tidak bisa begitu saja menjalankan usahanya, pada dasarnya harus fokus pada strategi dalam landasan bisnis. Adapun teknik membangun usaha dapat berupa izin usaha, komitmen dan hak yang dimiliki masing-masing PKL

Begitu pula di Kota Jambi memiliki beberapa pasar walaupun banyak bermunculan pasar modern tetapi pemerintah Kota Jambi masih mempertahankan dan terus meningkatkan pemeliharaan dan keberadaan pasar – pasar tradisional yang di kelola Pemerintah Kota Jambi maupun dikelola pihak swasta antara lain yaitu :

1. Pasar Tradisional yang di kelola oleh Pemerintah Kota Jambi ada beberapa pasar yaitu: Pasar Angso duo, Pasar Induk Grosir, Pasar Talang Banjar , Pasar Kasang, Pasar TAC, Pasar Olak Kemang,

- Pasar Pelayangan, Pasar Lopak, Pasar Tanah Pilih, Pasar Sitimang, Pasar Sijimat, Pasar Gang, Pasar Buah – Buahan, Pasar Kebun Handil, Pasar Mayang Sari, Pasar Kebun Bungo, Pasar Tanggo Rajo,
2. Pasar Tradisional yang di kelola oleh pihak swasta Ada beberapa yaitu: Pasar Aurduri, Pasar Hongkong Jelutung Jambi, Pasar Empat Enam Selincih Jambi Timur, Pasar Kito Simpang Chandra Jambi Selatan, Pasar Simpang YUKA Paal Merah, Pasar Kebun Kopi, Pasar Simpang Pulai, Pasar Keluarga, Pasar Mama, Pasar Vila Kenali Mayang Jambi.¹

Minimnya lapangan pekerjaan serta sewa pasar Tradisional yang sangat besar membuat penduduk mencari jalan alternatif untuk terus melanjutkan hidupnya yang sesuai dengan kebutuhannya, salah satunya dengan memilih bekerja sektor informal, ialah selaku Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang kaki lima merupakan orang dagang disektor informal yang bergadang memakai gerobak, serta terletak di banyak tempat dipinggir jalur ataupun pinggir jalur ataupun trotoar dan bahu jalan sebagai fasilitas umum yang bukan digunakan sebagai tempat berdagang, keberadaan PKL sering berhubungan dengan kesan yang kotor, kumuh, menimbulkan polusi udara serta tidak tertib di daerah perkotaan. Akan tetapi keberadaan para PKL ini menjadikan kebutuhan warga paling utama kelas dasar yang membutuhkan PKL tersebut untuk penuhi kebutuhannya yang terjangkau.

¹ David Cardona, *Strategi komunitas pembangunan dalam penataan pedagang* Surabaya: Scapindo Media Pustaka, 2020, hlm. 36

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Mahyudin selaku pedagang kaki lima di pasar talang banjar beliau mengatakan

“Saya sudah pernah berjualan di dalam namun sepi tidak cukup untuk makan kadang untuk bayar modal jualan juga tidak cukup, yang laku yang berada dekat dengan pintu masuk pasar karena sudah ada di luar makanya pembeli enggan untuk kedalam. Saya jualan disini (pinggir jalan), karena kita cari rezeki buat makan, harapannya jika disuruh berjualan di dalam juga, petugas harus tegas”²

Pedagang kaki lima adalah salah satu jenis kegiatan informal. Berdasarkan peraturan daerah kota jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang peraturan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan sarana usaha dan tidak bergerak, menggunakan fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan atau jasa swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.

Berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 2016 terkait dengan perbedaan antara ketentuan pasal 29 peraturan wali kota jambi tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) yaitu ada harapan pedagang kaki lima (PKL) untuk menempati tempat ataupun lahan pemerintah wilayah bagikan supaya terciptanya area yang bersih serta tertib. Tetapi pada realitas yang terdapat di lapangan, masih banyak PKL yang berjualan di atas Trotoar ataupun pinggir jalur dan bahu jalur serta sarana universal selaku tempat dagang yang dicoba pedagang kaki lima

² Wawancara dengan bapak Mahyudin penjual bumbu-bumbu Dapur pedagang Kaki lima Pasar Talang Banjar 6 Agustus 2022

(PKL) di kota jambi. Pemerintah kota jambi serta satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota jambi sudah berupaya.³

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Siti seorang selaku pedagang ayam potong Pedagang Kaki Lima Ibu siti memiliki pandangan yang dilakukan oleh pemerintah dan SATPOL PP sebagaimana dikatakan Ibu Siti kepada peneliti:

“Saya sudah mengetahui tentang larangan berjualan di badan jalan melalui spansuk saya memandang penertiban yang dilakukan SATPOL PP itu bagus, tetapi keadaan tidak memungkinkan karena saya sudah terbiasa dan sudah lama berjualan disini”⁴

Pada dasarnya PKL mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitas. Hal ini menunjukkan seakan-akan para PKL tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan.

Maraknya PKL dipasar talang banjar pemerintah kota jambi terus menata pedagang kaki lima PKL guna menciptakan lingkungan yang tertib dan asri. Penataan serta pembinaan PKL tersebut dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan juga tim terpadu yang berdiri sebagai satuan kerja perangkat desa (SKPD). Kasatpol PP kota jambi, mengatakan

³ Peraturan Daerah kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Penjual Ayam Potong Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar 06 Agustus 2022

pihaknya sudah sering melakukan penertiban diwilayah tersebut. Namun, pedagang tidak ada efek jera dan masih terus berjualan dikawasan tersebut. Pengurus pasar juga sudah memasang himbauan Perda No. 47 tahun 2002 tentang ketertiban umum serta perda kota jambi no.12 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Pemberlakuan denda terhadap pedagang dan pembeli dikawasan badan jalan pasar talang banjar juga sudah dilakukan, tapi memang sampai saat ini masih ada yang bandel.

Berbicara sektor perdagangan, maka tidak dapat lepas dari komunitas pedagang sebagai pelakunya, yang salah satu ialah pedagang kaki lima dikenal dengan sebutan PKL yaitu mereka yang bekerja dengan memanfaatkan situasi, tempat keramaian yaitu berjualan dibadan jalan, trotoar atau tempat umum lainnya. Ini menandakan kebijakan pemerintah kurang ditanggapi oleh PKL sehingga implementasi antara pedagang dan pemerintah kurang koordinasi.⁵

Adapun Artikel mengenai Penertiban PKL di Pasar Talang Banjar⁶

Berisi "Penertiban pedagang kaki lima (PKL) Dikawasan Pasar Baru Talang Banjar, Jalan Orang Kayo Pingai, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Sabtu (16/5/2020) sore, diwarnai kericuhan. Informasinya, kericuhan terjadi karena pedagang yang masih berjualan diluar pasar tidak terima ditertibkan. Bahkan sempat terjadi aksi saling pukul antara pedagang dengan anggota Satpol PP yang melakukan penertiban. Panit 1 Sabraha Polsek Jambi

⁵ Zoraya Adryana. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) (Studi Kasus Relokasi Pkl Monument 45 Banjarsari Kota Surakarta" Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Social Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta 2009, Hlm 3

⁶ Metro Jambi "Penertiban PKL Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi" Diakses Dari <https://metrojambi.com/red/2020/05/17/53553/penertiban-PKL-di-pasar-talang-banjar-diwarnai-kericuhan> Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2022

Timur Ipda Maryoto Saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya keributan saat penertiban pedagang oleh petugas Satpol PP. "Iya, ada keributan sore tadi antara pedagang kaki lima dengan petugas (Satpol PP, red), karena para pedagang tidak terima ditertibkan," ujar Maryoto saat dikonfirmasi.

Sejumlah pedagang diketahui juga telah membuat laporan Polisi ke Polresta Satpol PP."Iya, ada pedagang perempuan berjumlah tiga orang dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polresta Jambi." Tandasnya.

Kemudian ada artikel dari jambikita.id juga membahas mengenai kemacetan mengenai kemacetana mengenai PKL Pasar Talang Banjar Kota Jambi.

Artikel Penertiban PKL di Pasar Talang Banjar Kota Jambi⁷

"Berisikan : "Salah satu pedagang mengatakan, dirinya bersama pedagang lain terpaksa berjualan disepuran jalan, yang letaknya di jalan arah menuju ke lokasi Pasar Talang Banjar. Hal ini lantaran di lokasi Pasar sudah tidak ada tempat untuk berjualan lagi, atau sudah penuh. Sedangkan dari Joko, salah satu pembeli mengatakan lebih cepat belanja di jalan dikarenakan tidak perlu parkir motor"

Hasil wawancara salah satu pedagang di PKL Talang Banjar Kota Jambi yang bernama Siti "saya jualan disitu karena didalam sudah penuh terus juga, sudah punya banyak langganan diluar juga dek, terus untuk baiaya sewa tempat didalam juga mahal dek, ya walaupun diluar tu nimbulin kemacetan tapi mau gimana lagi karena sudah betah disini lagian. Saya juga bayar iyuran gitu tiap harinya, ya kayak gitulah dek saya dan teman-teman PKL sering ditertibkan tapi masih dak bisa pindah lokasi karena hal tadi tu karena itu mata pencarian kami semua sebagai

⁷ Kumpuran.Com "Kericuhan Warga Penertiban Pkl Pasar Baru Talang Banjar Di Kota Jambi, Diakses, <https://kumpuran.com/jambikita/jkericuhan-warnai-penertiban-pkl-pasar-baru-talang-banjar-di-kota-jambi-1qbmdb7/full> Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2022

pedagang kaki lima disini”⁸

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa di pasar Talang Banjar yang berada di pinggir menunjukkan bahwa PKL di pasar talang banjar yang berada di pinggir jalan menimbulkan berbagai masalah. Seperti kemacetan yang sering di alami pengguna jalan, mengganggu kenyamanan pejalan kaki serta mengganggu keindahan system, khususnya pada pagi hari, namun diluar itu, PKL menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dan meringankan kemiskinan. Menjadi seorang wirausaha tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, hanya di butuhkan kemandirian dan kemauan yang kuat untuk berjualan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan keluarga pedagang⁹

Pada dasarnya PKL mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitas. Hal ini menunjukkan seakan-akan para PKL tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan.

Dari kenyataan tersebut, ada beberapa hal yang teridentifikasi mengapa para PKL tidak terganggu dengan adanya larangan berjualan tersebut adalah:

⁸ Observasi di Pasar Talang Banjar 6 Agustus 2022

⁹ Observasi Di Pasar Talang Banjar 6 Agustus 2022

1. Para penegak hukum tidak tegas dalam menerapkan sanksi hukum.
2. Para PKL merasa bahwa mereka sebagai pedagang legal berjualan di kaki lima karena kutipan retribusi dilakukan oleh petugas dari pemerintah daerah.
3. Para PKL tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari nafkah, jika pedagang tersebut terkena kegiatan penertiban maka hal ini dianggap sebagai hari yang “naas” yang tidak perlu diselesaikan, karena setelah itu pedagang tersebut masih dapat berjualan.¹⁰

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan UPTD pengelolaan pasar kota jambi di pasar talang banjar mengatakan bahwa strategi pemerintah kota jambi dalam penataan dan memberdayakan PKL yaitu:

“Ditempatkan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kota contoh: yang berada diancol dekat dengan rumah gubernur atau ditaman PKK tehok, itu sudah di atur sedemikian rupa sehingga tidak berada di faasilitas-fasilitas umum seperti yang berada di pinggir-pinggir jalan yang bisa membuat kemacetan lalu lintas. Kemudian secara umum penataan PKL itu izinnya melalui kecamatan masing-masing wilayah”

“Untuk pasar talang banjar PKL memang masih banyak yang di pinggir-pinggir jalan umum, tetapi kami selaku pengurus pasar selalu membina, menertibkan PKL yang masih erada di pinggir-pinggir jalan untuk masuk menempati tempat yang telah pemerintah kota sediakan di dalam pasar. Tetapi para pedagang masih saja berjualan di pinggir-pinggir jalan tersebut”¹¹

Adapun permasalahan penelitian ini yaitu Sebelum diadakannya penelitian pedagang kaki lima oleh pemerintah kota jambi keadaan

¹⁰ Thesis Mahasiswa S2 Program Studi Ekonomi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. Tahun 20221

¹¹ Wawancara dengan bapak Supriyono kepala unit pasar talang banjar 26 Agustus 2022

pedagang sangat tidak teratur karena dengan adanya sering menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan bahu jalan. Upaya dalam penataan dan sudah cukup sering dilakukan oleh pemerintah kota jambi, khususnya, ditangani oleh pasar kota dan satuan petugas pamong praja (satpol PP). Meskipun begitu sulit untuk melakukan penataan sampai benar-benar rapih. PKL masih berdagang ditempat yang tidak semestinya.

Sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sebelumnya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dian Azhari dalam Jurnal Administrasi FISIP Universitas Riau Vol. 4 No. 1 Februari 2017 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada dasar atas dan pasar bawah kota Bukit Tinggi. Penelitian ini medeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima pasar atas dan pasar bawah kota bukit tinggi dengan acuan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan pemberdayaan pedagang kaki lima. Persamaan penelitian yang dilakukan Dian Azhari dengan penelitian efektivitas kebijakan penataan pedagang kaki lima di Setra Kuliner Deles adalah sama-sama membahas tentang penataan PKL yang membedakannya adalah pada teori dan lokasi penelitian. Dian Azhari menggunakan teori Implementasi kebijakan George R. Terry dengan lokasi pasar atas dan pasar bawah kota bukit tinggi sedangkan penulis menggunakan teori Efektivitas pelaksanaan kebijakan dari Sondang P Siagian dengan lokasi Sentra Kuliner Deles

kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Kedua, penelitian oleh Areeza dan Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc. FISIP UNESA yang berjudul Evaluasi Kebijakan penataan PKL di Sentra PKL manukan Lor Kota Surabaya tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Evaluasi kebijakan dari penataan PKL di Surabaya khususnya di Sentra PKL manukan Lor. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah pada fokus penelitian atau tempat PKL ditata yaitu Sentra PKL. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, sentra PKL yang berbeda, serta teori yang digunakan. Jika Areeza dan Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc berfokus pada Evaluasi penataan PKL di Sentra PKL manukan Lor menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn maka penelitian melakukan penelitian di Sentra Kuliner Deles dengan fokus pada Efektivitas pelaksanaannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elliza Ariftiani, FISIP Universitas Jember dengan judul Efektivitas pelaksanaan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupten Jember 2014. Adapun tujuan dari penelitian Elliza Ariftiani adalah untuk mengetahui Efektivitas penataan PKL yang telah dilaksanakan dengan tujuan peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang PKL di Kabupaten Jember. Persamaan penelitian terletak pada fokus penelitian dan peraturan yang digunakan dimana peneliti juga menggunakan fokus efektivitas kebijakan dengan perpedoman pada tujuan kebijakan

peraturan daerah terkait yang mengatur tentang penataan PKL. Sedangkan perbedaannya pada lokasi penelitian dimana peneliti mengkhususkan pada Sentra Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **“Strategi Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah kota jambi dalam penataan pedagang kaki lima (PKL)?
2. Bagaimana implementasi peraturan daerah kota nomor 12 tahun 2016 tentang penataan pedagang kaki lima di pasar talang banjar kota jambi provinsi jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemerintah kota jambi dalam penataan pedagang kaki lima (PKL)
2. Untuk mengetahui pengimplementasian peraturan daerah kota nomor 12 tahun 2016 tentang penataan pedagang kaki lima.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian dokumen

strategi pengendalian pemerintah kota jambi dan pengaturan pedagang kaki lima (PKL).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide untuk pemerintah dan mereka yang ingin tahu bagaimana control dan strategi structural pemerintah kota jambi pedagang kaki lima (PKL).

1.5 Landasan Teori

Konsep adalah ide atau gagasan terhadap sesuatu yang belum bisa diterima kebenarannya. Sedangkan teori adalah penjelasan ilmiah terhadap sesuatu yang teruji yang dapat diterima kebenarannya. Maka penulis menganggap perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi serta peneliti lebih dahulu menjelaskan sebuah kerangka konseptual agar lebih memahaminya.

1.5.1 Manajemen Strategi

Pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*manajemen*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasional. Menurut Rusday Ruslan, strategi adalah memutuskan apa yang harus dikerjakan dalam langkah-langkah tertentu dalam proses manajemen dimulai dengan penentuan suatu rencana (*plan*), dimana rencana tersebut merupakan produk dari

suatu perencanaan (*palnning*), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen.

Menurut *Johnson*, keputusan strategi menaruh perhatian pada ruang lingkup aktivitas organisasi, penyesuaian aktivitas organisasi dan lingkungannya. Alokasi dan relokasi sumber daya utama dalam organisasi, nilai, harapan dan tujuan dari strategi yang berpengaruh, serta implikasi perubahan operasional pada seluruh organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses yang dalam setiap tahapnya memerlukan partisipasi dari semua pihak, dan pertanggung jawaban dari pemimpin. Dengan demikian manajemen strategi meliputi penetapan kerangka kerja untuk melakukan berbagai proses tersebut.

Manajemen strategi juga memiliki definisi bermacam-mcam yakni suatu proses berkesinambungan yang membuat organisasi secara keseluruhan dapat *match* dengan lingkungannya baik bersifat internal maupun eksternal. Kombinasi ilmu dan seni untuk mompormulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang bersifat *cross* fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya.

Usaha untuk mengembangkan kekuatan yang ada diperusahaan untuk menggunakan atau menangkap peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai misi yang telah ditentukan. Dari define tersebut tampak ada beberapa kesamaan dasar yang bisa ditangkap, yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai, perubahan

lingkungan yang harus diantisipasi serta strategi yang harus diimplementasikan.¹²

Menurut John dan Richard (2008) menyatakan bahwa manajemen strategis adalah seperangkat alat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan. Terdiri atas Sembilan tugas pokok:

1. Memformulasikan misi perusahaan
2. Mengembangkan model analisis tentang strategi perusahaan yang merefleksikan kondisi internal dan kemampuan perusahaan
3. Menilai lingkungan eksternal perusahaan
4. Menganalisis strategi pilihan yang cocok bagi perusahaan
5. Mengidentifikasi dan menentukan strategi dan memilih strategi
6. Mengidentifikasi dan menentukan strategi utama perusahaan yang bersifat jangka panjang
7. Mengembangkan tujuan dan strategi perusahaan yang bersifat jangka pendek
8. Mengimplementasikan strategi yang telah dipilih dengan anggaran dan alokasi sumber daya
9. Mengevaluasi keberhasilan dari strategi yang telah diimplementasikan.

Implementasi strategi termasuk mengembangkan yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan

¹² Crow Dirgantoro, *Manajemen Strategik Konsep, Kasus Dan Implemetasi* (Jakarta:PT Grasindo, 2001), hlm 9

mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Suksesnya implementasi strategi terletak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan.

a. Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau PKL sebagai salah satu bentuk sektor internal adalah setiap orang yang melakukan kegiatan niaga yang beroperasi secara keliling dengan modal terbatas dan berelokasi ditempat umum tanpa legalitas formal.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu komponen utama dari usaha mikro yang terlibat dalam suatu informal, menghadapi lingkungan yang masih kurang kondusif, sehingga menjadi factor yang menghambat eksistensi dan perkembangan bisnisnya. Mengakibatkan kondisi umum pedagang kaki lima mengalami produktivitas dan daya saing yang relatif rendah.¹³ Pedagang kaki lima menjadi pekerjaan yang tersedia bagi anggota masyarakat yang berpendidikan rendah dengan pengalaman serta keterampilan yang sangat terbatas.¹⁴

Adapun Indikator Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Menurut Perda Nomor 12 Tahun 2016:

1. Penataan PKL

Penataan PKL menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun

¹³ Jumhur, J. "Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Dikota Singkawang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK)*". 4 (1), 2015, 125

¹⁴ Sedyastuti, K, "Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global." *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 2018, 117

2016 adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁵

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah kota jambi nomor 12 tahun 2016 meliputi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam peraturan daerah kota jambi nomor 12 tahun 2016 adalah:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi, mikro yang tangguh dan mandiri
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Bagian dari kesatuan umum dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dilakukan oleh walikota melalui tim terpadu atau pejabat yang ditunjuk, dalam melaksanakan penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

¹⁵ Evita E, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)" (Doctoral Dissertation, Brawijaya University). 2013 Hlm, 945

- a. Pendataan PKL
- b. Pendaftaran PKL
- c. Penetapan Lokasi PKL
- d. Pemindahan PKL dan Penghapuan Lokasi PKL
- e. Peremajaan Lokasi PKL.

2. Penertiban PKL

Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam menyikapi fenomena PKL dan dalam pembuatan kebijakan (peraturan daerah) tentang penertiban PKL untuk menertibkan dan menata PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum tanpa mematikan usaha PKL sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016. Penataan, Penertiban, dan Pemberdayaan PKL yang dilakukan di kota jambi selain untuk mencegah kecamacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan pemjambretan. Sehubungan dengan penjabaran di atas, diperlukan penanganan yang serius terhadap keberadaan PKL sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat dalam gerak untuk lebih maju, terbuka, tertata, terbina, dan terpelihara sekaligus dapat dirasakan secara nyaman oleh masyarakat kota jambi.

Tujuan dari penertiban adalah menertibkan PKL yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perda dan produk hukum yang lain.

3. Pembinaan PKL

Pembinaan mengandung arti suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Jambi sesuai dengan peraturan daerah kota Jambi nomor 12 tahun 2016. Pembinaan ini bertujuan untuk mengarahkan para PKL agar mau mentaati peraturan yang berlaku, sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan dan kepentingan umum.

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa, dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, baik individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan.¹⁶

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan di setujui.¹⁷ Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut *Tachjan* implementasi kebijakan publik disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi public sebagai institusi (Birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan Studi Adminitasi Publik sebagai ilmu.¹⁸

¹⁶ Header Akib. "Implementasi kebijakan," *jurnal Administrasi Public*, Vol.1.No.1 (2010),Hlm 2

¹⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Public*, (Jakarta: Buki Aksara, 1997) Hlm 64

¹⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2005) hlm 53

Sementara itu *Abdul Wahab* mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan esksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.¹⁹

Implementasi kebijakan dapat dikatakan salah satu proses dari kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi juga berguna untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dari sebuah kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana tujuan awal dari kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan tahap yang paling penting dalam suatu kebijakan karena suatu kebijakan ditetapkan untuk mengatur suatu tatanan yang dianggap penting bagi masyarakat luas. *Dwiyanto Indiahono* mengartikan bahwa Implementasi kebijakan sebagai tahapan yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar diterapkan dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcome* seperti yang direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat setelah kebijakan itu di

¹⁹ Ibid Hlm 55

Implementasikan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcome* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau dalam waktu yang lama setelah implementasi kebijakan dan diharapkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.²⁰

Menurut Metter dan Horn dalam Agustiono yang biasa disebut juga *Model Of Policy Implementasi*, proses implementasi ini sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan yang tersedia, pelaksanaan dan kebijakan publik.

Ada enam Indikator variable menurut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan public tersebut, adalah:²¹

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implemetasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosiokultur berada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia

²⁰ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017) hlm. 144

²¹ Agustiono, *Implementasi Kebijakan Public Model Van Metter Dan Carl Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 153

merupakan Sumber Daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi ciri-ciri dengan tepat serta cocok dengan agen pelaksanaanya.

4. Sikap/Kecenderungan (*Dispositis*) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak-pihak yang terlihat dalam suatu

proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu sebaliknya

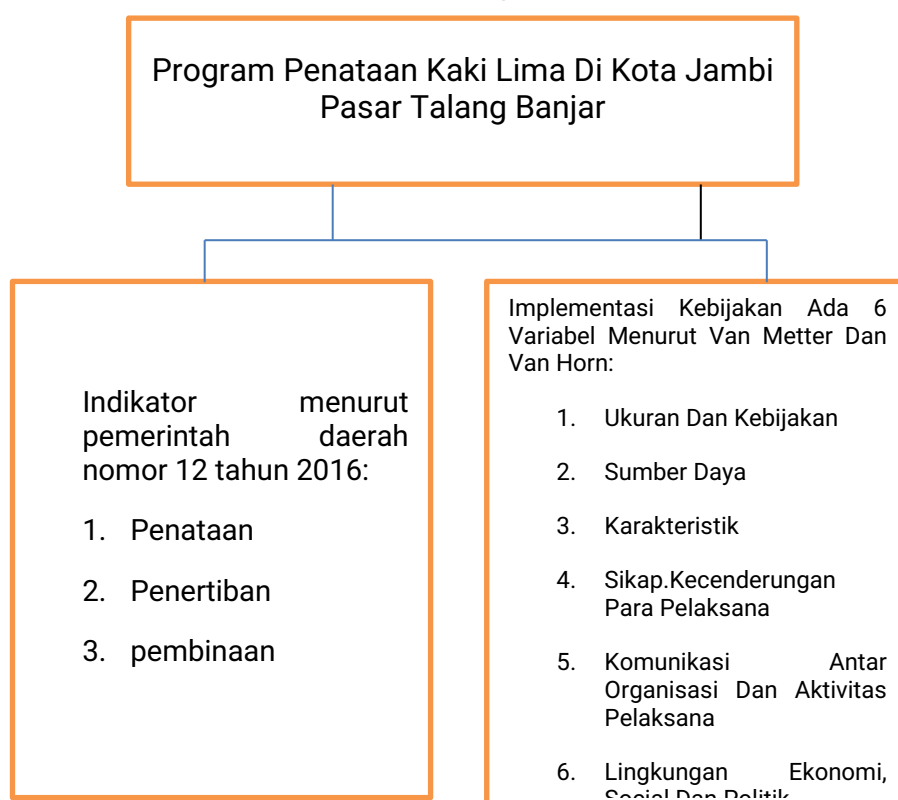
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

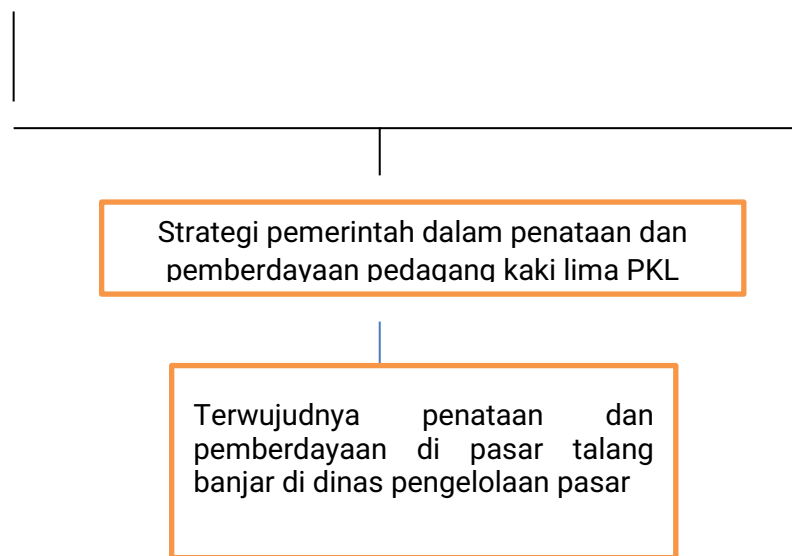
Sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan

1.6 Kerangka Berfikir

Gambar 1.

Kerangka Berfikir





1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian pemahaman yang mendasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Selain itu penelitian juga merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan suatu kebenaran.

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat mendalam, mengikuti proses, dilakukan oleh peneliti sendiri, tidak boleh diwakilkan atau menyuruh orang lain untuk mengumpulkan data.²² Metode kualitatif sendiri merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan.²³ Artinya yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan hasil dari naskah wawancara, memo dokumen, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya Deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya, sementara metode deskripsi adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu sejak atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi

²² Tim penyusun penulisan *pedoman penulisan skripsi*, cet ke-1 (jambi: Syari'ah Press Fakultas Syari'ah, 2010) hlm. 19

²³ Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Prana Ilmu, 2016), hlm 98.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur).

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai mana dari fakta yang relevan. Sebagai sebuah studi kasus, penelitian ini juga ingin mengenai serta menjelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi social.²⁴

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data Primer dan Sekunder.

1.) Data Primer

Dalam penelitian ini digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari laporan yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukan data primer ini disebut juga sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, adapun sumber data dari peneliti ini yaitu berdasarkan observasi dan wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui

²⁴ Deddy Maulana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Roesdakarya, 2003. Hlm.201

pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi atau data yang berbentuk sudah jadi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber berupa literature-literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal, laporan atau data-data yang terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL.

1.7.5 Teknik menentukan informan.

Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak mengenal sampel (cuplikan), maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan dengan objek penelitian.

Teknik penelitian informan ini adalah jenis data primer. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara pada narasumber dan meninjau langsung pada lokasi penelitian. Teknik sampling yang digunakan ialah (purposive sampling) yaitu teknik pengambilan sampel. Sumber data dengan pertimbangan atau sudah ditentukan. Berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informan yang lebih luas. Tidak menutup kemungkinan jika peneliti menggunakan teknik (snowball sampling) yaitu bertambahnya informasi yang di butuhkan. Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, mengenai sampel informasi atau informan tersebut, maka peneliti menentukan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pasar Talang Banjar

2. Kepala Bidang Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi
3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan penelitian secara seksama, yaitu dengan cara:

a). Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencacatan serangkaian perilaku dan sesuai yang berkenaan dengan organisme yang sesuai dengan tujuan empiris.²⁵ Akan tetapi observasi disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan cara menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan atau kuesioner. Maka peneliti mengamati secara langsung di lapangan objek penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti melakukan interaksi secara langsung dalam situasi sosial dengan subjek penelitian, teknik ini digunakan untuk mengamati dan memahami peristiwa yang terjadi di lapangan.

b). Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan Tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian

²⁵ Ibid, hlm 118

kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari interview pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya dan pemahaman diperoleh.²⁶ Metode kualitatif merupakan salah satu teknik digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan, pertama dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. dalam diri subjek penelitian. Kedua, yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau. Masa sekarang, dan juga masa mendatang.²⁷

c). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto lapangan dalam kegiatan pengumpulan informasi atau data.

1.7.7 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis data,

²⁶ Djaman Satori & Aan K. *"metode penelitian kualitatif"* (bandung: Alfabet) 2009

²⁷ Patilima *"metode penelitian kualitatif"* (semarang: Alfabeta, 2007. Hlm 65

interpretasi, dan triangulasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data ini dilakukan penyederhanaan data yang ada di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Selanjutnya dapat dilakukan penyajian data yang memudahkan dalam memahami informasi secara sistematis. Dari hal tersebut berulah diambil kesimpulan dari data-data yang ditentukan.

Teknik pengelolaan data yang digunakan yaitu model analisis interaktif Miles dan Huberman, model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu:

a. Reduksi Data

Dalam mereduksi data, setiap penelitian akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data²⁸

Reduksi data dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini data-data hasil dari wawancara yang didapatkan mengenai analisis fungsi pengawasan kebijakan rangkap jabatan, serta factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dari rangkap jabatan. Dengan demikian

²⁸ Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif, R dan D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.249

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miled dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Langkah tiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah proses penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada temuan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada.

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Data penelitian menggunakan teknik Trigulasi sebagian teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.²⁹

Dalam Moloeng, membedakan empat macam Triagulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori, pada penelitian ini dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triagulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik drajat kepercayaan dari suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat Yang berbeda dalam penetian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membanfingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan

²⁹ Moleong Lj, (2004) *Metode Penelitian Kualitatif "Bandung PT Remaja Rosdakarta* hlm, 330

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.